

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat, terutama pendidikan agama Islam bagi umat muslim. Hakekat pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani sesuai dengan ajaran Islam, dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, berlakunya semua ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hakikat pendidikan Islam selaras dengan pendidikan nasional. menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003, bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang sesuai dengan indikator keberhasilan tujuan pendidikan. Salah satu indikator keberhasilan tujuan pendidikan Islam adalah ketika peserta didik telah mampu mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada hakekatnya pendidikan Islam untuk membentuk kepribadian peserta didik agar dapat hidup bermasyarakat.

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, informal dan nonformal. Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan melalui pendidikan berbasis masyarakat. “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat”.²

¹ Balitbang Keagamaan. 2003. *Memelihara Tradisi dan Inovasi*. Jakarta : Kemenag RI. Hal : 100.

² Undang-undang nomor 20 tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 ayat 16.

Dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal menurut Unesco yang dapat dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan ke depan dalam tujuh hal strategi sebagai berikut: 1) perlunya perluasan definisi dan cakupan pendidikan nonformal, 2) keterlibatan komunitas untuk keberhasilan, 3) pendidikan nonformal harus didasarkan pada kebutuhan lokal, 4) dukungan pemerintah berkelanjutan, 5) keterkaitan literasi dengan kegiatan ekonomi, 6) peran pendidikan dasar dalam mengatasi kemiskinan, 7) pendidikan nonformal merupakan kegiatan multi-sektor.³

Pendidikan berbasis masyarakat erat kaitannya dengan pendidikan agama Islam yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Program pendidikan berbasis masyarakat muslim dapat diselenggarakan melalui program pemberdayaan pendidikan agama Islam. Mengingat Islam adalah agama yang menjanjikan kesejahteraan bagi semua manusia di muka bumi ini, maka pemberdayaan dalam Islam juga bukan hanya sekedar anjuran, melainkan sebuah gerakan (*action*) yang harus dilaksanakan oleh umat muslim.

Program Pemberdayaan pendidikan agama Islam adalah sistem tindakan nyata (*action*) yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat muslim dalam persepektif pendidikan Islam. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yaitu kekuasaan atau keberdayaan.⁴ Dengan demikian, konsep pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam masalah ekonomi semata, melainkan juga mencakup perubahan sistem dan struktur dalam pendidikan terutama pendidikan agama Islam.

Istilah pemberdayaan tidak dapat terlepas dari Pendidikan Islam karena sesuai dengan dasar pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu dasarnya adalah firman Allah Swt "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada

³ Yoyon Suryono dan Entoh Tohani, 2016. *Inovasi Pendidikan nonformal*. Yogyakarta: Graha Cendekia. hal :90

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

diri mereka sendiri.”⁵ Perubahan yang dimaksud tentunya selaras dengan program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

Menurut Haidar dalam bukunya yang berjudul pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia baik dari segi lembaga maupun mata pelajaran, perlu diberdayakan dengan mencari jalan keluar dari berbagai problema yang dihadapi. Problema tersebut dapat dilihat dari pendidik, peserta didik, manajemen, kurikulum dan sebagainya, yang semuanya itu perlu diperhatikan.⁶

Problema yang dihadapi pendidikan agama Islam pada saat ini adalah kehidupan masyarakat muslim modern yang dikenal dengan generasi milenial abad 21 terutama masyarakat perkotaan, seperti premanisme, narkoba, perjudian, pornografi, dan kejahatan lainnya melalui media online. Disamping itu juga pendidikan agama Islam dihadapkan dengan keadaan masyarakat yang belum mengenal teknologi digital di zaman modern ini yaitu masyarakat yang ada di pelosok desa seperti kemiskinan baik miskin pengetahuan maupun miskin finansial. Program pemberdayaan pendidikan agama Islam diharapkan dapat menjadi solusi atas problema-problema tersebut.

Pemberdayaan pendidikan Islam dengan memberdayakan berbagai komponen yang terkait dengan peningkatan mutu yakni kelembagaan, kurikulum, manajemen, pendidik, peserta didik, alat, sarana prasarana, dan fasilitas serta kebijakan pemerintah.⁷ Komponen pemberdayaan pendidikan Islam tersebut yang terkait langsung dengan materi pendidikan agama Islam adalah kurikulum, pendidik dan peserta didik, dari komponen tersebut yang menjadi fokus utama pemberdayaan pendidikan agama Islam adalah pendidikan akidah, akhlak dan amal.

Program pemberdayaan pendidikan agama Islam tujuan utamanya adalah pendidikan akhlak, pendidikan akhlak mempunyai penjabaran yang sangat luas. Menurut hasil penelitian tentang pemberdayaan pendidikan agama Islam yang

⁵ Departemen Agama RI. 2008. *Al-qur'an & terjemah..* Bandung : Diponogoro.

⁶ Haidar Putra Daulai. 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. hal 11

⁷ Haidar. *Ibid..*hal : 12

berfokus pada pendidikan akhlak menyatakan bahwa pemberdayaan pendidikan agama Islam di masyarakat mengedepankan *action*, yakni *action* akhlak *mahmudah* yang memberikan manfaat kepada masyarakat.⁸

Teori pemberdayaan merupakan satu kesatuan proses dan hasil, “*theories of empowerment include booth processes and outcomes.*”⁹ Artinya dalam program pemberdayaan pendidikan agama Islam harus ada kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil program.

Program pemberdayaan pendidikan agama Islam diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup beragama bagi masyarakat, yang salah satu faktornya adalah adanya peserta didik yang setelah menjalani pendidikan masih merasa sulit untuk dapat hidup bermasyarakat sehingga ketergantungan dengan ijazah, apabila ijazahnya tidak berlaku maka pengangguran akan terjadi yang pada akhirnya akan menambah persoalan yang ada di masyarakat.

Salah satu program pemberdayaan pendidikan agama Islam di pedesaan yaitu terdapat di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim. Program Saung Ilmu bertujuan untuk merubah paradigma masyarakat dari *mustahik* menjadi *muzaki* atau merubah pola fikir masyarakat dari ketergantungan menjadi mandiri dan meningkatkan kualitas hidup beragama Islam bagi masyarakat, dengan upaya meningkatkan pengetahuan pendidikan agama Islam di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga program ini dikenal dengan istilah program pemberdayaan pendidikan agama Islam. Program Saung Ilmu desa Pelakat menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat interaksi masyarakat dan pusat pendidikan Islam masyarakat.¹⁰

Program Saung Ilmu di desa Pelakat ini dilakukan pendampingan secara langsung dan intensif oleh pendamping dari Laznas Al-Azhar selama tiga tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan data yang ada, setelah berjalan dua tahun tepatnya pada tahun 2015 program Saung Ilmu ini menjadi

⁸ Masyruhin Rosyid, Tesis “Relevansi Pendidikan berbasis Masyarakat dengan Pendidikan Islam”. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. hal : 123

⁹ Perkins. *Empowerment theory, research, and application*, American Journal of Community Psychology. diakses 1 Oktober 2018 . Hal : 569

¹⁰ Kohapa, Toko Masyarakat Pelakat. Wawancara pada tanggal 01 November 2018.

laboratorium inovasi pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbagai prestasi lainnya.¹¹

Akan tetapi, Faktanya meskipun Saung Ilmu desa Pelakat telah berjalan selama 5 (lima) tahun sejak pertama kali berdirinya sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan sejauhmana tujuan program telah tercapai.¹² Keadaan ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya lagi pendampingan secara langsung atau mungkin karena faktor lainnya.

Menurut pendamping program dari Laznas Al-Azhar bahwa “program Saung Ilmu di desa Pelakat ini sudah tidak ada pendampingan lagi secara langsung karena masyarakat sudah dianggap mandiri.”¹³ Sementara itu, menurut ketua Saung Ilmu desa Pelakat bahwa “semenjak tidak ada lagi pendampingan membuat program Saung Ilmu ini kurang aktif karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat”.¹⁴

Berdasarkan teori tentang pemberdayaan pendidikan agama Islam dan faktanya tentang keberadaan Saung Ilmu Pelakat yang menyelenggarakan program pemberdayaan pendidikan agama Islam dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan evaluasi yang responsif terhadap program pemberdayaan pendidikan agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat ini.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.¹⁵ Melakukan evaluasi program pendidikan merupakan hak masyarakat, “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.¹⁶

¹¹ Inagara. 2015. *Laboratorium Inovasi kabupaten Muara Enim (Saung Ilmu Pelakat)*. Jakarta : LAN. Hal : 3

¹² Observasi Saung Ilmu Pelakat pada tanggal 01 November 2018.

¹³ Abarudin, Pendamping Saung Ilmu Pelakat. Wawancara pada 07 November 2018.

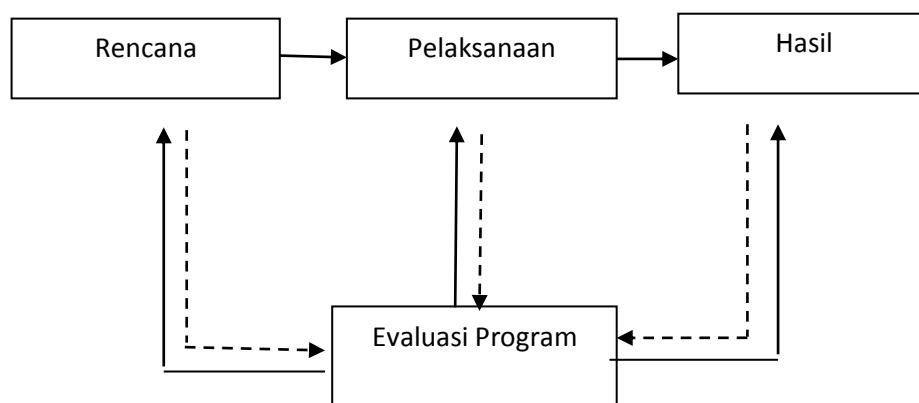
¹⁴ Haryanto, Ketua Saung Ilmu. Wawancara pada 10 November 2018.

¹⁵ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 21

¹⁶ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 8

Tujuan evaluasi program yaitu : 1) memantau pelaksanaan program, 2) memperbaiki rencana program, 3) menyempurnakan system penyampaian, 4) meningkatkan program, 5) membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan.¹⁷ Oleh karena itu apapun bentuk program yang dilakukan perlu dievaluasi sehingga tersedia informasi yang valid.

Berdasarkan berbagai referensi yang ada, model evaluasi yang sesuai adalah model evaluasi responsif (*responsive evaluation*) yang dikembangkan oleh Robert Stake. Model evaluasi responsif fokus pada evaluasi *antecedents* (rencana), *transactions* (pelaksanaan) dan *outcomes* (hasil). Arah dan alur evaluasi program terdiri dari rencana, pelaksanaan dan hasil. dapat terlihat pada gambar 1.1. Sketsa Evaluasi Program, berikut :



Gambar 1.1. Sketsa Evaluasi Program¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas tentang teori pemberdayaan pendidikan agama Islam dan fakta program pemberdayaan pendidikan agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Pendidikan Agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim”**

¹⁷ A Muri Yusuf, 2015. *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group hal 146

¹⁸ A Muri Yusuf, 2015. *Ibid.* hal 147

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi pada perencanaan, pelaksanaan dan hasil program pemberdayaan berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim. Evaluasi pada penelitian ini menggunakan model evaluasi responsif dan subjek yang dievaluasi adalah pengelola dan peserta program pemberdayaan berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana pelaksanaan program berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim?
3. Bagaimana hasil program berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perencanaan program pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kesesuaiannya dengan perencanaan program pemberdayaan di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim.
3. Untuk mengetahui hasil program dan kesesuaiannya dengan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan berbasis pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi pengguna dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. bagi pendidik atau guru pendidikan agama islam, sebagai referensi penyelenggaraan program pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. bagi peserta didik (masyarakat) dapat membantu memecahkan masalah kemandirian keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
3. bagi lembaga penyelenggara program (saung ilmu), sebagai penambah khasanah keilmuan, referensi dan informasi pembaca.
4. bagi peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang relevan.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka teori sebagai berikut :

1. Evaluasi Program

Tolak ukur keberhasilan suatu program dapat diketahui dengan adanya evaluasi yang merupakan proses pengumpulan informasi untuk membantu pihak-pihak tertentu mengambil keputusan tentang suatu objek. Dalam dunia pendidikan, evaluasi selalu dikaitkan dengan prestasi hasil belajar siswa. Akan tetapi pada hakekatnya evaluasi lebih luas dari sekadar prestasi belajar siswa.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Evaluasi pendidikan adalah “kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.”¹⁹

¹⁹ Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 21

Pengertian program menurut Ahuja dalam A Muri, yang menyatakan :
 “.. a programme is an organized set of activities designed to produce result or set of result that will have an impact on a specific problem or need”.²⁰
 Dengan kata lain program dapat diartikan sebagai sejumlah aktivitas yang dirancang secara terorganisir untuk membuat seperangkat hasil yang akan membawa dampak pada terpecahnya masalah khusus atau terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan.

Dengan demikian, evaluasi program pendidikan merupakan studi yang sistematis dan didesain, dilaksanakan, serta dilaporkan untuk membantu memutuskan, meningkatkan keberhargaan dan manfaat program-program pendidikan termasuk program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

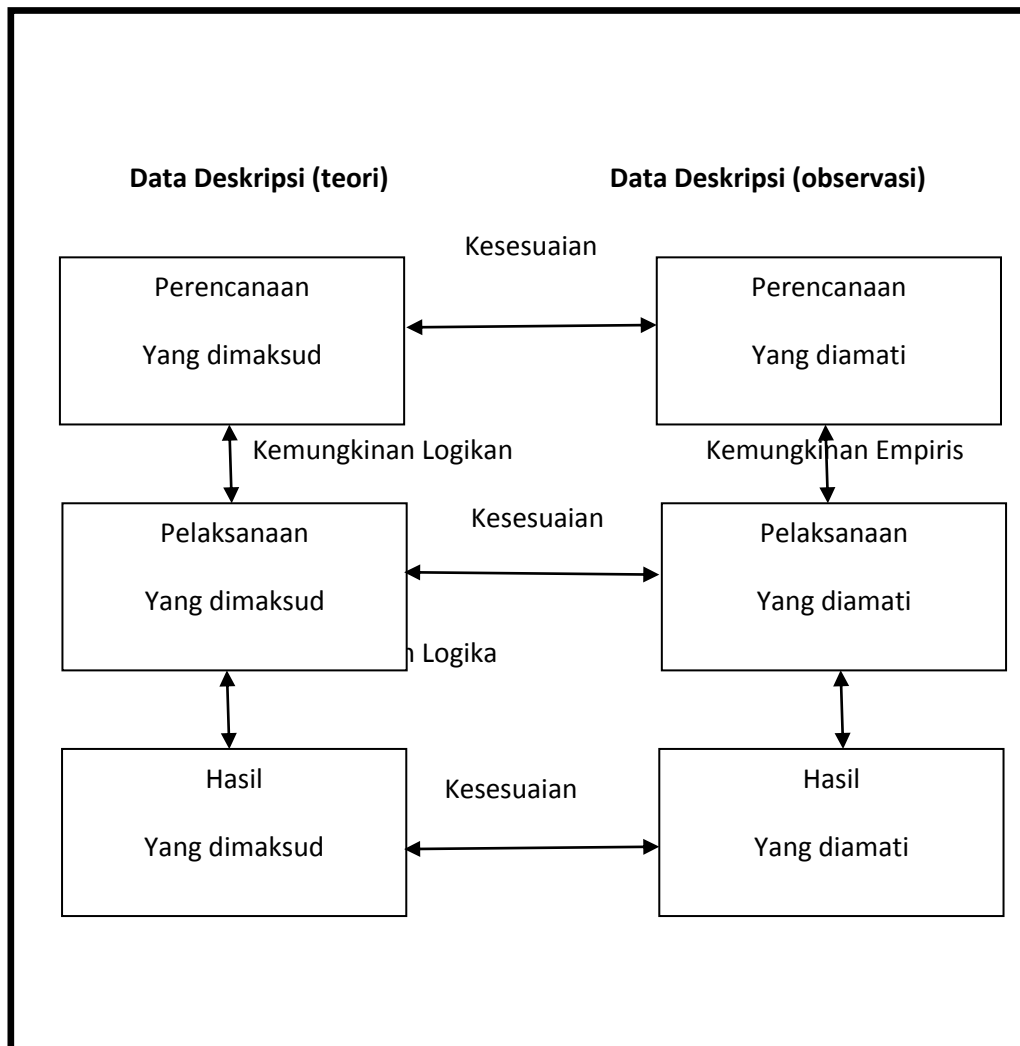
2. Model evaluasi program responsif (*responsive evaluation*)

Model evaluasi responsif oleh Robert Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu (1) deskripsi (*description*) dan (2) pertimbangan (*judgment*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) *antecedent/context*, (2) *transaction/process*, dan (3) *outcomes/output*.²¹ “The theory of responsive evaluation Robert Stake (1975) coined the term responsive evaluation. The historical development of evaluation: measurement, description, judgement and negotiation.”²² atau dengan bahasa lain tahapan evaluasi programnya : 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan dan 3) Hasil. Dapat terlihat pada gambar 1.2. berikut :

²⁰ A Muri Yusuf, *Opcit.* hal : 144

²¹ Arikunto, Suharsimi & Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal : 43

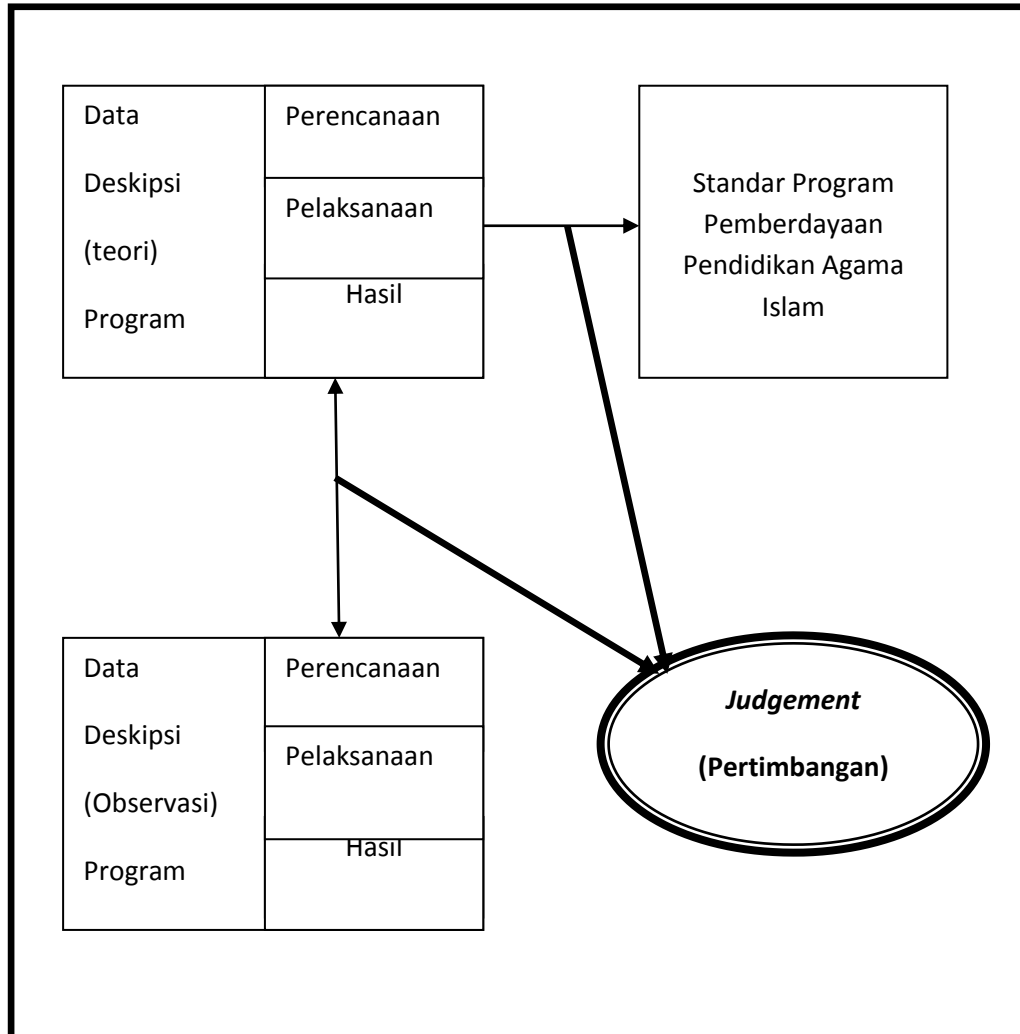
²² Abma, 2005. *Responsive evaluation: Its meaning and special contribution to health promotion*. The Netherland : Elsevier.



Gambar 1.2. Kerangka Proses Evaluasi Data Deskriptif²³

Setelah melakukan deskripsi data sesuai dengan kerangka proses evaluasi data deskriptif pada gambar 1.2. di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan *judgement* atau pertimbangan. Dapat terlihat pada gambar 1.3. kerangka Jugement evaluasi program berikut :

²³ A Muri Yusuf, 2015. *Ibid.* hal 130



Gambar 1.3. Kerangka *Judgement* Evaluasi Program²⁴

Dengan demikian, model evaluasi responsif tepat digunakan untuk melakukan evaluasi program dengan mendeskripsikan dan memberikan pertimbangan kepada pelaksana program. Evaluasi responsif terdiri atas tiga tahap dalam evaluasi program yaitu perencanaan, pelaksanaan dan hasil program.

²⁴ A Muri Yusuf, 2015. *Ibid.* hal 131

3. Evaluasi Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan, Secara etimologis berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.²⁵ Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Teori pemberdayaan merupakan satu kesatuan proses dan hasil, “*theories of empowerment include both processes and outcomes.*”²⁶

Sejalan dengan pandangan tersebut bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka teori pemberdayaan pada prinsipnya sejalan dengan teori-teori pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan, termasuk pada program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

²⁶ Perkins. *Empowerment theory, research, and application*, American Journal of Community Psychology. diakses 1 Oktober 2018 . Hal : 569

²⁷ Ambar Teguh .Opcit., 2004. Hal : 83.

b. Pendidikan Agama Islam

Program pemberdayaan merupakan bagian dari Pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam itu sendiri memiliki beberapa pengertian. Menurut pemahaman pendidikan agama Islam adalah :

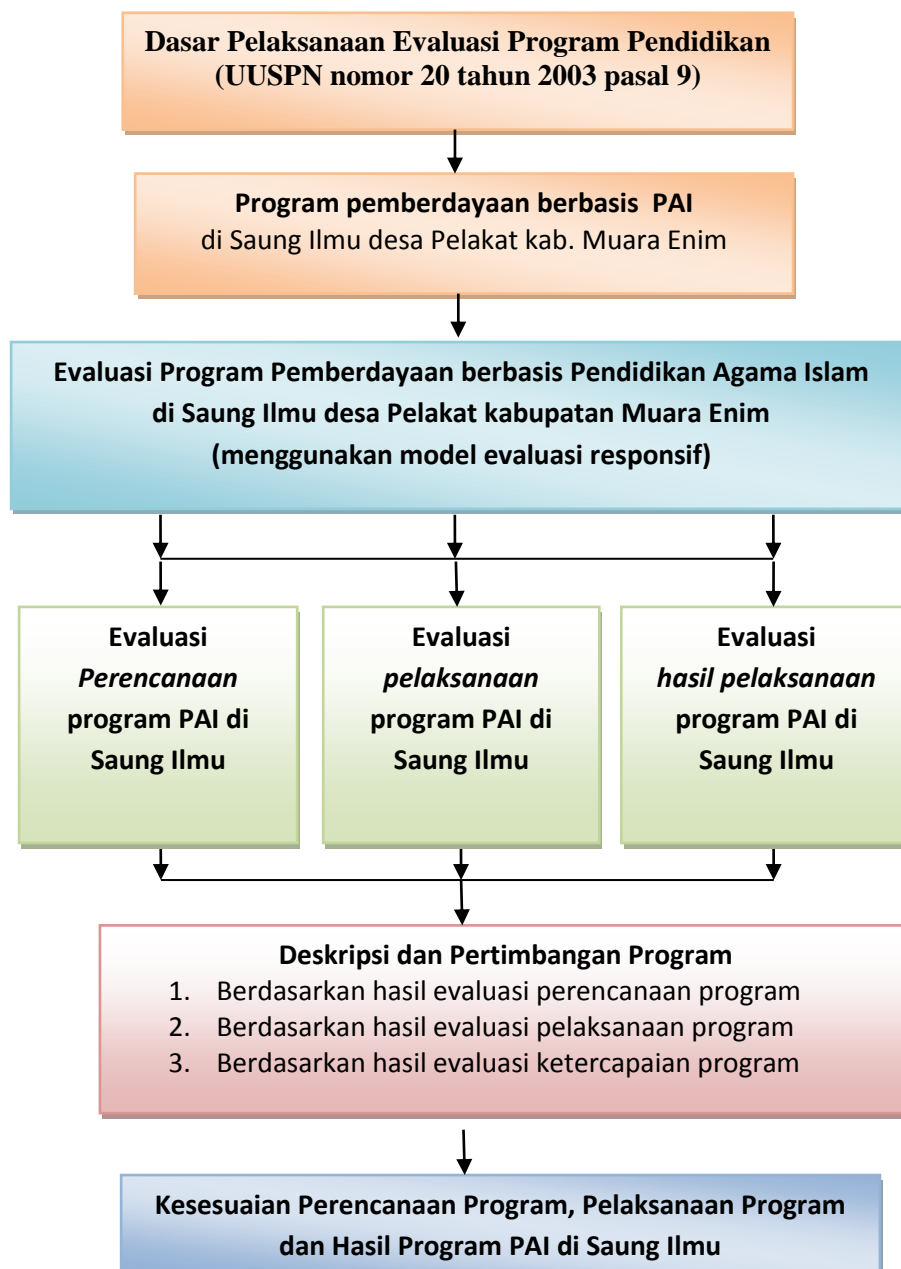
- 1) Pendidikan menurut Islam atau pendidikan yang berdasarkan Islam atau pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun berdasarkan ajaran Islam yang terkandung dalam sumbernya al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Upaya mendidikkan agama dan nilai-nilai ajaran Islam agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) yang terwujud dalam tindakan berupa kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu orang lain dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam.
- 3) Pendidikan dalam Islam atau praktek atau proses pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, baik Islam sebagai agama, ajaran, sistem budaya dan peradaban sejak jaman Nabi Muhammad sampai sekarang.²⁸

Berdasarkan teori tentang pemberdayaan pendidikan agama Islam di atas, yang ditinjau dari makna program pemberdayaan, hakekat pendidikan agama Islam dan langkah-langkah pemberdayaan maka program pemberdayaan pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bidang akidah dan amal. Bidang akidah bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan pandangan, pemahaman, keyakinan dan perbuatan. Bidang amal bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan amal-amal saleh sehingga tercapai kesempurnaan amal ibadah.

²⁸ Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Hal :4-6

c. Evaluasi Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka evaluasi program ini yaitu pada perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil program pemberdayaan pendidikan agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim. Dapat terlihat pada gambar 1.4. kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1.4. Kerangka Berfikir Evaluasi Program PAI

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan judulnya yaitu “Evaluasi Program Pendidikan Agama Islam di Saung Ilmu desa Pelakat kabupaten Muara Enim”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi menggunakan model evaluasi responsif (*responsive evaluation*) yang melalui tiga tahap evaluasi yaitu perencanaan, pelaksanaan dan hasil program.

2. Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam

Program Pemberdayaan berbasis Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program memberdayakan (mengaktifkan) nilai-nilai pendidikan agama Islam pada masyarakat pedesaan yang kurang aktif karena terbatasnya akses pendidikan dan ketidakmampuan masyarakat setempat, sehingga perlu diberdayakan sesuai dengan tujuan akhir pendidikan agama Islam untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat. Dengan demikian maka program pemberdayaan berbasis pendidikan agama Islam maksudnya bukan memberdayakan Pendidikan Agama Islam tetapi memberdayakan masyarakat pedesaan dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam.

3. Saung Ilmu

Saung Ilmu adalah Lembaga Pemberdayaan berbasis Pendidikan Islam yang bersifat nonformal, salah satu fungsi Saung Ilmu adalah Pemberdayaan bidang Pendidikan Agama Islam yang bertempat di desa Pelakat kabupaten Muara Enim. Bentuk program pemberdayaan Saung Ilmu desa Pelakat bidang Pendidikan Agama Islam adalah santri desa dan da'i sahabat masyarakat yang didampingi oleh YPI Al-Azhar Indonesia kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

H. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiat dan menjaga keaslian penelitian ini, maka perlu disampaikan tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. M Ridwan Thahir tahun 2017, dalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi Program Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”. Di dalam tesisnya ini, Ridwan meneliti evaluasi program menggunakan model *responsive evaluation* tentang Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Perbedaan penelitian Ridwan tersebut dengan penelitian ini adalah pada program yang diteliti dan lokasi penelitian. Ridwan meneliti program pembinaan mental PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini meneliti program pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Saung Ilmu Pelakat kabupaten Muara Enim.

2. Masyruhin Rosyid tahun 2010, dalam tesisnya yang berjudul “Relevansi Pendidikan Berbasis Masyarakat Dengan Konsep Pendidikan Islam”. Di dalam tesisnya ini, Rosyid meneliti konsep pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam al-Qur’an.

Perbedaan penelitian Rosyid tersebut dengan penelitian ini adalah pada bentuk program yang diteliti. Rosyid meneliti nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam program pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini melakukan evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam di Saung Ilmu Pelakat.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab, yaitu :

1. **Bab pertama** : Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
2. **Bab kedua** : Landasan Teori, menguraikan tentang teori evaluasi program, model-model evaluasi program, evaluasi program responsif, pemberdayaan,

pendidikan agama Islam dan evaluasi program pemberdayaan pendidikan agama Islam.

3. **Bab ketiga** : Metodologi Penelitian, menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **Bab keempat** : Hasil Penelitian, yang terdiri menguraikan data-data hasil penelitian, yaitu gambaran subjek penelitian, analisis data dan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
5. **Bab kelima** : Penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi dalam penelitian ini.